

Judul : Pelonggaran aturan masker, DPR minta masyarakat waspada di keramaian
Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pelonggaran Aturan Masker

DPR Minta Masyarakat Waspada Di Keramaian

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta aturan pelonggaran masker tidak membuat masyarakat jadi lengah, kemudian mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Mengingat, Covid-19 belum berakhir meski penyebarannya menurun.

SALEH menilai, kebijakan pelonggaran masker dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan masyarakat yang diminta memakai masker lebih dua tahun terakhir.

"Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," ujar Saleh.

Politikus PAN ini berpendapat, kebijakan pelonggaran masker sudah melalui evaluasi dan pertimbangan matang. Penyebaran Covid-19 sudah turun, pelaksa-

naan imunisasi hampir merampungkan tahap I dan II, serta pengalakan vaksin *booster*.

Namun demikian, Saleh berharap masyarakat tetap mematuhi prokes di tempat-tempat keramaian. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus tetap dilaksanakan.

Begitu juga, cuci tangan harus menjadi kebiasaan. Sebab, kebersihan anggota tubuh menjadi sangat penting baik di masa pandemi ataupun di masa normal.

"Kebersihan adalah kunci utama

kesehatan. Itu berlaku universal. Karena itu, kebersihan harus tetap dijaga dan dipalakkan," tandasnya.

Selain itu, Saleh mengatakan, makanan juga harus tetap dijaga. Pemberian gizi yang baik sangat berpengaruh pada kesehatan dan ketahanan tubuh. Makanan yang dikonsumsi harus diupayakan memenuhi keseimbangan gizi. "Sosialisasi terhadap hal ini perlu ditingkatkan," saran dia.

Saleh berharap, kebijakan terbaru ini dapat membuka pintu untuk mengalihkan dari pandemi ke fase endemi Covid-19. Fase endemi ini tentu bisa dilalui bersama jika ada kesadaran untuk saling menjaga dan saling mengingatkan agar semua bisa sehat.

Terkait menuju fase endemi, dia meminta semua pihak bers-

abar. Sebab, ada banyak faktor yang masih perlu dikaji dan didalami. Jika nanti sudah dianggap tepat, status endemi tersebut pasti akan diumumkan.

"Kita tentu diperbolehkan melakukan pelonggaran-pelonggaran. Negara-negara lain juga sudah melakukan hal sama," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan, kebijakan pelonggaran masker perlu diiringi kampanye secara masif kepada masyarakat.

"Sosialisasi itu harus sama-gencarnya seperti ketika awal pandemi Covid-19. Mengharuskan masyarakat menggunakan masker sebagai prokes," ujar Alifudin, kemarin.

Politikus PKS ini menilai, vaksinasi tetap perlu digencarkan meski ada pelonggaran peng-

gunaan masker. Hal itu bertujuan agar vaksinasi lengkap kepada masyarakat sepenuhnya rampung.

"Sama halnya dengan kebijakan masker, vaksinasi pun dinilai perlu langkah sosialisasi melalui pendekatan persuasif," saran dia.

Selain itu, Alifudin juga meminta Pemerintah memastikan kapan pandemi menjadi endemi. Persoalan data harus dianalisis dengan tepat, agar status endemi ini bisa tepat.

Alifudin mengimbau masyarakat tetap hati-hati karena Covid-19 merupakan virus yang menyebar melalui udara.

"Kebiasaan menjaga hidup bersih dan sehat perlu dilanjutkan. Seperti cuci tangan pakai sabun dan kebiasaan hidup bersih,"

pungkasnya ■ TIF